

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sub pada bab ini, peneliti memaparkan penelitian terdahulu mengenai penyebab Arab Saudi untuk melakukan Normalisasi dengan negara Qatar. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan kebijakan Arab Saudi yang melakukan Normalisasi dengan negara Qatar.

Pertama, penelitian Afif Notodewo dan Yon Machmudi. (2022) berjudul *Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2021*. Penelitian ini mengkaji Arab Saudi beserta aliansinya, yaitu UEA (Uni Emirat Arab), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar serta melakukan blokade jalur darat, air, dan udara pada 2017. Saudi dan aliansinya menganggap kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki yang mengancam eksistensi mereka di kawasan Teluk. Namun, pada 2021 dunia dikagetkan dengan normalisasi hubungan antara kedua belah pihak ditandai

dengan kerjasama. Penelitian ini membahas alasan mengapa Saudi dan Qatar melakukan normalisasi hubungan. Penelitian ini menggunakan kacamata grand theory neorealisme beserta teori relative gain dan prisoner's dilemma. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat perebutan hegemoni antara Saudi, Iran, dan Turki. Serta kondisi yang tidak menguntungkan Saudi seperti terpilihnya Joe Biden dan merebaknya pandemi Covid 19

Kedua, penelitian oleh Ramadhanissa, T. S. (2022) berjudul *Penyelesaian Krisis Diplomatik Qatar-Arab Saudi Tahun 2017: Tinjauan Dari Konsep Geopolitik*.⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Qatar telah mengalami krisis diplomatik setelah

⁹ Ramadhanissa, T. S. (2022). *Penyelesaian Krisis Diplomatik Qatar-Arab Saudi Tahun 2017: Tinjauan Dari Konsep Geopolitik*. Skripsi UPN Veteran, Yogyakarta.

pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi pada tahun 2017. Tidak hanya Arab Saudi, tiga negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir juga turut serta memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut dilakukan atas dasar tuduhan terhadap Qatar yang dianggap mendukung dan membiayai kelompok teroris di Kawasan Timur Tengah. Arab Saudi dan tiga negara Teluk lainnya melakukan embargo ekonomi dengan memblokade jalur perdagangan darat, udara dan laut yang menuju Qatar. Embargo tersebut telah menyebabkan Qatar mengalami kerawanan pangan, penurunan PDB negara serta berimplikasi pada politik dan sosialnya. Qatar pun berupaya untuk bangkit dari krisis diplomatik yang melanda negaranya dengan memberlakukan kebijakan independen untuk lepas dari pengaruh Arab Saudi. Qatar memanfaatkan kondisi geografisnya yang strategis di Kawasan Timur Tengah untuk mengatasi krisis diplomatiknya. Melalui konsep geopolitik, dapat dianalisis berbagai strategi yang dijalankan oleh Qatar sehingga berhasil keluar dari krisisnya. Salah satu strategi Qatar adalah melakukan swasembada.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi (2021) yang berjudul *Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar Dalam Menghadapi Krisis Diplomatik Dengan Arab Saudi Periode 2017-2020*.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang kebijakan luar negeri yang dilakukan Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi selama periode 2017-2020. Kemampuan Qatar dalam menghadapi dampak dari krisis diplomatik dengan Arab Saudi menarik untuk diteliti karena adanya kesenjangan *hard power* dan luas wilayah antara Qatar dan Arab Saudi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat empat kebijakan luar negeri yang signifikan dalam upaya Qatar menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi, yaitu normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, penguatan hubungan

¹⁰ Muhammad Rifqi, (2021) *Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar Dalam Menghadapi Krisis Diplomatik Dengan Arab Saudi Periode 2017-2020*. Skripsi, FISIP, Universitas Islam Negeri. Jakarta diakses pada 1 februari 2023

militer dengan Turki, ekspansi pelabuhan Hamad, dan perbaikan reputasi di dunia internasional. Dengan melakukan beberapa kebijakan luar negeri tersebut, Qatar mampu bertahan dari dampak krisis diplomatik dengan Arab Saudi serta dapat memenuhi kepentingan nasionalnya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Abdurrahman (2019) yang berjudul *Normalisasi hubungan Qatar dan Saudi Arabia 2017-2019*. Penelitian ini membahas tentang Putusnya hubungan Saudi Arabia dengan Qatar pasca *Middle East Summit* 2017 didasari atas dugaan Saudi Arabia bahwa Qatar mendukung kelompok teroris, radikal, dan ekstrimis. Hal tersebut didukung oleh presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang juga menduga bahwa Qatar turut dalam mendanai kelompok terorisme. Pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti oleh Mesir, UAE, Yaman, dan Bahrain yang mendukung atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Pernyataan tersebut dibantah oleh Qatar bahwa negaranya tidak mendukung serta membantu kelompok terorisme, radikal, dan ekstrimis, bahkan negaranya turut membantu dan aktif dalam perlawanan terhadap terorisme. Namun faktanya, Qatar membantu kelompok Islam yang didalamnya juga termasuk kelompok yang dikategorikan oleh beberapa negara sebagai kelompok terorisme, terlebih Qatar juga menjalin hubungan kerjasama dengan Iran yang merupakan musuh dari Saudi Arabia.

11

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Arab Saudi melakukan tuduhan kepada Qatar karena Qatar turut dalam mendanai kelompok terorisme. Pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti oleh Mesir, UAE, Yaman, dan Bahrain yang mendukung atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Pernyataan tersebut dibantah oleh Qatar bahwa negaranya tidak mendukung serta membantu kelompok terorisme, radikal, dan ekstremis, bahkan negaranya turut membantu dan aktif dalam perlawanan terhadap terorisme. Namun faktanya, Qatar membantu kelompok Islam yang didalamnya juga termasuk kelompok yang dikategorikan oleh beberapa negara

¹¹ Hamzah Abdurrahman. (2019). *Normalisasi hubungan Qatar dan Saudi Arabia 2017-2019*. Skripsi, FISIP, Universitas Islam Negeri. Jakarta diakses pada 1 Februari 2023

sebagai kelompok terorisme, terlebih Qatar juga menjalin hubungan kerja sama dengan Iran yang merupakan musuh dari Saudi Arabia.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurhafiza yang berjudul “*Kebijakan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Qatar tahun 2017*.” Penelitian ini membahas tentang Arab Saudi yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi juga mengumumkan blokade penuh terhadap Qatar, menutup perbatasan darat, pelabuhan, dan wilayah udara dengan Qatar. Semua pesawat yang bepergian ke dan dari Qatar dilarang mendarat di Arab Saudi. Diplomat Qatar diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Arab Saudi sementara warga negara Qatar lainnya diizinkan pergi selama dua minggu. Kemudian Arab Saudi menghentikan hubungan militer dengan Qatar atas konflik Yaman dan menutup kantor berita Al Jazeera di negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017.¹²

Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena beberapa alasan. Pertama, potensi keunggulan Qatar terhadap Arab Saudi, khususnya di bidang ekonomi yang dapat mengancam pengaruh Arab Saudi di kawasan teluk. Kedua, karena media Al Jazeera milik Qatar terus memberitakan tentang Ikhwanul Muslimin dan kelompok militan lainnya yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi. Al Jazeera juga menjadi media yang membantu menyebarkan demokrasi di kawasan teluk khususnya saat Arab Spring. Terakhir karena afiliasi Qatar dan Iran telah membuat Arab Saudi merasa bahwa Qatar patuh karena telah bekerja sama dengan negara yang selalu dianggap musuh oleh Arab Saudi.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Astri Audina Savitri, Budi Mulyana, S. IP, M.Si yang berjudul *Hubungan Arab Saudi dan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik Tahun 2017*. Penelitian ini menjelaskan tentang

¹² Nurhafiza .(2019). *Kebijakan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar tahun 2017*. Skripsi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

aksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar secara sepihak. Pemutusan hubungan diplomatik ini terjadi akibat adanya ketidak selarasan politik luar negeri di antara kedua negara. Pemutusan hubungan diplomatik ini berakibat pada pemblokiran batas darat, laut, dan udara Qatar. Tidak hanya itu pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar juga diikuti oleh beberapa negara di kawasan perbatasan teluk yaitu UAE, Mesir dan Bahrain.¹³

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Alasan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi kepada Qatar salah satunya dilatar belakangi Adanya dugaan dari Arab Saudi terhadap Qatar yang memiliki hubungan dengan kelompok kelompok yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan di kawasan Timur Tengah. Hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin muncul karena adanya ikatan ideologis antara Qatar dengan Ikhwanul Muslimin yang membuat Qatar mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di berbagai negara yang dapat memberikan keuntungan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Qatar. Apa yang dilakukan Qatar tersebut dianggap oleh Arab Saudi sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Berbeda dengan enam penelitian terdahulu, penelitian ini memfokuskan kepada penyebab perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi setelah 3,5 tahun melakukan embargo terhadap Qatar. Faktor-faktor domestik dan internasional yang menyebabkan normalisasi Saudi dengan Qatar menjelang tahun 2021 akan menjadi fokus penelitian ini.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Politik Luar Negeri

Menurut Hans Morgenthau, politik luar negeri adalah "struggle for power among nations." Dalam pandangan Morgenthau, negara-negara saling bersaing untuk

¹³ Astri Audina Savitri, Budi Mulyana, S.IP, M.Si .(2019). *Hubungan Arab Saudi dan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik Tahun 2017*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

mempertahankan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia internasional.¹⁴

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*Action Theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.¹⁵

Pendapat yang dijelaskan oleh Modelski yaitu bahwa politik luar negeri tidak selalu berkaitan dengan hubungan antar negara. Namun politik luar negeri juga dapat dilihat dari suatu kesatuan sistem atas aktivitas tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengubah kondisi atau perilaku negara lain dan dapat dilihat dalam bentuk

¹⁴ Hans Morgenthau.(1948). *Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf. Hal 4.

¹⁵ Yanyan Muhammad Yani. Drs., MAIR., Ph.D. (2007) *Politik Luar Negeri*. Sesko TNI AU. Diakses pada 1 Februari 2023.

penyesuaian terhadap suatu kondisi di lingkungan eksternal. Modelski juga memberikan gambaran mengenai politik luar negeri sebagai reaksi atau respon baik dengan tujuan maupun tidak terhadap suatu kondisi atau situasi lingkungan eksternal.

Dalam karyanya James Rosenau mengemukakan definisi politik luar negeri sebagai berikut: "*Foreign policy is the pattern of goals, values, and strategies that a nation follows in its dealings with other countries and with actors other than nation-states, in order to achieve its aims in the international system. It includes decisions about how the nation can best protect its interests, how to maximize its advantages in cooperation and competition with other states, and how to manage its involvement in transnational activities that transcend the reach of the state.*"¹⁶

Rosenau juga menjelaskan bahwa politik luar negeri adalah "the set of decisions and actions that governments undertake to pursue their objectives in the international arena." Dalam pandangan Rosenau, politik luar negeri melibatkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mengejar tujuan-tujuannya di dunia internasional. Rosenau juga menekankan bahwa politik luar negeri merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai aktor internasional, seperti negara-negara lain, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan aktor non-negara lainnya. Oleh karena itu, politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dan persepsi-persepsi dari aktor-aktor internasional lainnya, serta oleh dinamika kekuasaan dan struktur dalam sistem internasional.¹⁷

Sedangkan Kenneth Waltz menjelaskan politik luar negeri adalah "permainan strategi antara negara-negara". Waltz mengemukakan bahwa negara-negara saling berinteraksi dalam konteks sistem internasional dan bertindak berdasarkan logika kepentingan nasional mereka masing-masing.¹⁸

Selain itu, Alexander Wendt menjelaskan politik luar negeri adalah "interaksi

¹⁶ James Rosenau N.(1969). *The Scientific Study of Foreign Policy.* " In *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: Free Press, 1969. Hal 5.

¹⁷ Ibid. Hal 220

¹⁸ Kenneth N Waltz.(1979). *Theory of International Politics.* New York: McGraw-Hill. Hal 88.

sosial antara aktor-aktor internasional". Wendt memandang politik luar negeri sebagai hasil dari interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor lain di dunia internasional, yang menciptakan struktur-struktur sosial tertentu yang mempengaruhi perilaku negara-negara.¹⁹

Menurut Plano dan Olton, Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Strategi yang dimiliki oleh suatu Negara dalam berhubungan dengan Negara lain juga dapat diartikan sebagai politik luar negeri dengan tetap berdasarkan nilai, arah, respons dan tujuan untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dari suatu Negara di dalam dunia internasional. Oleh sebab itu, setiap pemerintah suatu Negara memiliki sebuah kebijakan dan strategi terkait politik luar negeri yang bergantung atau mendasar kepada tujuan nasional dari setiap Negara tersebut.

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.²⁰

Mengenai tujuan dari politik luar negeri, KJ Holsti berpendapat bahwa tujuan utama dari politik luar negeri suatu negara adalah untuk mempromosikan kepentingan nasional negara tersebut di luar batas negaranya. Definisi Holsti tentang politik luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan, keputusan,

¹⁹ Alexander Wendt.(1999). *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press, 1999. Hal 199

²⁰ Jack C. Plano & Roy Olton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin. hal. 6.

dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam politik luar negerinya bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional negara tersebut di luar batas negaranya.

Kepentingan nasional yang ingin dipromosikan oleh suatu negara melalui politik luar negerinya dapat berupa kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan sebagainya. Misalnya, suatu negara dapat mengadopsi kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat pertahanannya, memperluas pasar ekspor, memperoleh dukungan politik dari negara-negara lain, atau mempromosikan nilai-nilai budaya atau ideologis tertentu.

Namun demikian, Holsti juga menekankan bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri suatu negara harus selalu dipertimbangkan secara hati-hati dan harus mengambil keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbeda dalam masyarakat dan pemerintahan negara tersebut.²¹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu Negara yaitu faktor dalam negeri atau internal dan faktor luar negeri atau eksternal. faktor-faktor tersebut merupakan bentuk implementasi dari aspirasi seluruh rakyat dari sebuah Negara yang memiliki kepentingan dan harus diperjuangkan oleh pemerintah di hadapan dunia internasional.

Tujuan utama teori kebijakan luar negeri adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan mengembangkan dan menguji berbagai teori, sarjana dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang motivasi, pendorong, dan konsekuensi keputusan kebijakan luar negeri, dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan mengantisipasi tindakan negara lain. Beberapa tujuan khusus dari teori kebijakan

²¹ K. J, Holsti.(1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Hal 102-103

luar negeri dapat meliputi:

- a) Menjelaskan motivasi di balik keputusan kebijakan luar negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam isu-isu seperti perdagangan, diplomasi, pertahanan, dan bidang hubungan internasional lainnya. Ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pendorong yang mendasari keputusan kebijakan luar negeri dan mengantisipasi tindakan negara lain.
- b) Menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis keputusan kebijakan luar negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat memberikan seperangkat alat analisis dan konsep yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi dari pilihan kebijakan yang berbeda.
- c) Mengidentifikasi pola dan tren dalam kebijakan luar negeri: Dengan memeriksa kebijakan dan tindakan berbagai negara dari waktu ke waktu, teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren perilaku kebijakan luar negeri, yang dapat menginformasikan perkembangan keputusan kebijakan di masa depan.
- d) Menawarkan wawasan tentang peran lembaga internasional: Banyak teori kebijakan luar negeri juga mempertimbangkan peran lembaga internasional, seperti Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi regional, dalam membentuk kebijakan luar negeri. Teori-teori ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pengaruh lembaga-lembaga ini terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
- e) Menasihati pembuat kebijakan tentang tindakan terbaik: Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri, teori kebijakan luar negeri dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu.

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan

politik luar negeri suatu negara, yaitu:

- a) Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
- b) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle term*), dan jangka panjang (*long-term*).
- c) Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.²²

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (*national interersts*) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/ keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis :

- a) *Core/basic/vital interests*; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *core/basic/ vital interersts* ini.
- b) *Secondary interests*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan sebagai contohnya.

Berkaitan dengan instrumen politik luar negeri, Menurut KJ Holsti, terdapat berbagai instrumen politik luar negeri yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional lainnya. Beberapa instrumen politik luar negeri yang umum digunakan oleh negara-negara antara lain adalah diplomasi, militer, ekonomi, dan propaganda.

1. Diplomasi

Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk memperbaiki hubungan antara suatu negara dengan negara lain melalui dialog dan

²² Bruce Russet & Harvey Starr. (1988). *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co., hal. 190-193.

negosiasi. Diplomasi melibatkan pertukaran informasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik secara damai.

2. Militer

Militer adalah instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk memperkuat keamanan nasional suatu negara dan melindungi kepentingannya di luar batas negara. Instrumen militer mencakup penggunaan pasukan militer, senjata, dan kekuatan yang terkait dengan keamanan nasional.

3. Ekonomi

Ekonomi adalah instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi nasional suatu negara di luar batas negara. Instrumen ekonomi meliputi kebijakan perdagangan, investasi, dan bantuan ekonomi.

4. Propaganda

Propaganda adalah instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik di luar negeri tentang suatu negara atau isu tertentu. Propaganda meliputi penggunaan media massa, budaya, dan acara-acara publik lainnya untuk mempromosikan pesan politik.²³

Teori kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi tentang bagaimana negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka, apakah itu ekonomi, terkait keamanan, atau terkait dengan masalah lain. Beberapa teori kebijakan luar negeri, seperti realisme dan liberalisme, menawarkan resep bagaimana negara harus berperilaku untuk mencapai tujuan mereka dan mempertahankan sistem internasional yang stabil. Teori-teori lain, seperti konstruktivisme dan Marxisme, lebih menekankan pada pemahaman faktor-faktor mendasar yang membentuk kebijakan luar negeri dan bagaimana faktor-faktor ini dapat diubah untuk mempromosikan hubungan internasional yang lebih kooperatif dan adil. Secara keseluruhan, tujuan dari teori kebijakan luar negeri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang membentuk

²³ K. J. Holsti.(1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Hal 103-107.

hubungan internasional dan untuk menawarkan panduan bagaimana negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka dalam lingkungan global yang berubah dan seringkali kompleks.

Tujuan utama teori kebijakan luar negeri adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan mengembangkan dan menguji berbagai teori, sarjana dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang motivasi, pendorong, dan konsekuensi keputusan kebijakan luar negeri, dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan mengantisipasi tindakan negara lain. Beberapa tujuan khusus dari teori kebijakan luar negeri dapat meliputi: Menjelaskan motivasi di balik keputusan kebijakan luar negeri:

1. Teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam isu-isu seperti perdagangan, diplomasi, pertahanan, dan bidang hubungan internasional lainnya. Ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pendorong yang mendasari keputusan kebijakan luar negeri dan mengantisipasi tindakan negara lain.
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis keputusan kebijakan luar negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat memberikan seperangkat alat analisis dan konsep yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi dari pilihan kebijakan yang berbeda.
3. Mengidentifikasi pola dan tren dalam kebijakan luar negeri: Dengan memeriksa kebijakan dan tindakan berbagai negara dari waktu ke waktu, teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren perilaku kebijakan luar negeri, yang dapat menginformasikan perkembangan keputusan kebijakan di masa depan.
4. Menawarkan wawasan tentang peran lembaga internasional: Banyak teori kebijakan luar negeri juga mempertimbangkan peran lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional, dalam

membentuk kebijakan luar negeri. Teori-teori ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pengaruh lembaga-lembaga ini terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

5. Menasihati pembuat kebijakan tentang tindakan terbaik: Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri, teori kebijakan luar negeri dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu.

2.2.2 Normalisasi

Normalisasi dapat diartikan sebagai proses pemulihan hubungan: Normalisasi dalam hubungan antar negara adalah proses pemulihan hubungan yang sebelumnya tegang atau rusak akibat konflik atau ketegangan politik, ekonomi, sosial, atau budaya antara dua negara atau lebih.²⁴

Normalisasi dalam hubungan antar negara juga dapat diartikan sebagai upaya rekonsiliasi antara dua negara atau lebih yang pernah terlibat dalam konflik atau perang.²⁵

Normalisasi sebagai proses pembukaan kembali hubungan antar negara juga dapat diartikan sebagai proses pembukaan kembali hubungan diplomatik antara dua negara atau lebih yang pernah memutuskan hubungan diplomatik karena konflik atau ketegangan politik.²⁶

Normalisasi sebagai konsep merupakan usaha yang ingin dilakukan agar kembali pada keadaan sebelumnya atau situasi yang lebih baik. Normalisasi pada dasarnya merupakan situasi dimana suatu aktor sebagai satu pihak menghadapi pihak lainnya, baik itu sebagai seseorang individu, kelompok, maupun sebagai negara, berusaha mencapai keadaan normal tersebut. Setiap aktor mengusahakan berbagai

²⁴ Farish A. Noor.(2003). *Islam Dan Demokrasi: Teks-Teks Pilihan*. Mizan, Hal 198.

²⁵ Joseph S. Nye.(2011). *The Future of Power*. New York: Public Affairs, Hal 80.

²⁶ Robert Jervis.(2013). *International Politics and Foreign Policy*. New York: Waveland Press.Hal 199.

cara yang tepat demi mencapai keadaan normal, karena sebelumnya hubungan antar aktor terasa kurang begitu baik. Permasalahan seperti perselisihan, ketegangan, konflik, timbulnya rasa tidak suka satu sama lain, atau kesalahpahaman, hubungan antar aktor menjadi tegang, dan situasi yang dianggap tidak baik. Situasi ini dapat berdampak pada kandasnya hubungan, hingga dianggap tidak ada lagi. Jika dalam konteks aktor ialah negara, dan jika kondisi dibiarkan seperti ini, maka akan berdampak pada hubungan negara bersangkutan. Agar hubungan dapat kembali stabil dan tetap terjaga, diperlukan usaha-usaha untuk mengembalikannya pada keadaan normal atau keadaan seperti sebelum hubungan memburuk. Berbagai upaya dilaksanakan agar setiap aktor mau mengakhiri hubungan buruknya, dan menghilangkan faktor-faktor penyebab hubungan buruk itu terjadi. Maka usaha normalisasi dapat membawa dampak positif terhadap hubungan antar negara.²⁷

Proses normalisasi hubungan bilateral adalah upaya untuk memulihkan hubungan yang sebelumnya terganggu atau terputus antara dua negara. Normalisasi dapat berupa upaya untuk memperbaiki hubungan ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hubungan diplomatik. Berikut adalah penjelasan mengenai proses normalisasi hubungan bilateral yang dilakukan oleh dua negara, yaitu Identifikasi masalah dan sumber konflik. Langkah pertama dalam proses normalisasi hubungan bilateral adalah mengidentifikasi masalah atau sumber konflik yang menyebabkan hubungan antara kedua negara terganggu atau terputus. Identifikasi masalah ini dilakukan melalui dialog dan pertemuan antara pihak-pihak terkait dari kedua negara.

Dalam buku "International Relations: Theories and Approaches", Jackson dan Sorensen membahas konsep, teori, dan pendekatan dalam hubungan internasional. Bab 14 buku ini membahas tentang "International Negotiation and Diplomacy", termasuk bagaimana proses normalisasi dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dan negosiasi antara kedua negara. Bab ini juga membahas tentang peran pemimpin

²⁷ Mohammad Alief Anshary (2021) *Peran Amerika Serikat Terhadap Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dengan Negara-Negara Timur Tengah*. Skripsi, FISIP, Universitas Hasanuddin. Diakses pada 2 Februari 2023

dalam menjalankan proses normalisasi dan pertukaran kunjungan tingkat tinggi sebagai salah satu upaya untuk memperkuat hubungan bilateral.

Aktor-aktor yang terlibat dalam normalisasi hubungan diplomatik antara dua negara dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan keadaan masing-masing negara. Namun, secara umum, aktor-aktor utama yang terlibat dalam proses normalisasi hubungan diplomatik adalah pemerintah, diplomat, dan pejabat tinggi dari kedua negara. Hal ini mencakup, antara lain, Presiden atau Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan pejabat lain yang terkait dengan masalah luar negeri dan hubungan bilateral.

Pemerintah dan diplomat dari kedua negara memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah yang menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik dan mencari solusi untuk memulihkan hubungan. Diplomat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertemuan dan negosiasi antara kedua negara. Sementara itu, pejabat tinggi seperti Presiden atau Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan dan memberikan arahan bagi diplomat dan pejabat lain yang terkait dengan hubungan bilateral.²⁸

Istilah normalisasi sering menjadi perbincangan di dalam ranah politik internasional di era saat ini. Sejarah dari kata *normalize* yang dideskripsikan sebagai “*a return to normalcy*” muncul semenjak tahun 1800 di bidang ilmu kesehatan. Namun istilah normalisasi terus berkembang sampai politik internasional sebagai sebuah konsep didalam hubungan diplomatik negara. Menurut Barston, normalisasi diartikan sebagai proses mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri konflik lewat beberapa cara seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau membangun hubungan diplomatik.

Pada hakikatnya normalisasi adalah mengembalikan hubungan yang sebelumnya dianggap tidak normal, dalam artian ketidak normalan (Abnormal) perubahan hubungan antara negara dengan negara lain atau aktor lainnya dengan

²⁸ G.R. Berridge. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. United Kingdom: Palgrave Macmillan

alasan yang tidak dapat didefinisikan. Peristiwa abnormal dapat menjadikan ketegangan hingga permusuhan antar belah pihak, atau bahkan sepihak saja. Di beberapa masalah yang terjadi, ketegangan terbentuk karena tidak selesainya negosiasi pasca perang dan juga indikasi seperti protes formal, serangan politik, dan tindakan politik pembalasan. Hal tersebut berkaitan dengan ke-tidak setujuan terhadap suatu kebijakan. Negara yang memiliki pengaruh terhadap negara lainnya juga dapat berimbas terhadap negara lainnya tersebut. Mengenai pemutusan hubungan diplomatik, durasi yang dilakukan sangatlah relatif tergantung dengan yang menjadi alasan kembalinya hubungan atau ketergantungan terhadap suatu negara terhadap negara lainnya. Biasanya ekonomi menjadi hal yang mengembalikan hubungan antar negara karena ketergantungan tersebut.

Mengenai pemutusan hubungan diplomatik, durasi yang dilakukan sangatlah relatif tergantung dengan yang menjadi alasan kembalinya hubungan atau ketergantungan terhadap suatu negara terhadap negara lainnya. Biasanya ekonomi menjadi hal yang mengembalikan hubungan antar negara karena ketergantungan tersebut.²⁹

Konsep normalisasi dari Robert P. Barston, dalam bukunya *Modern Diplomacy*, Barston mendefinisikan normalisasi sebagai sebuah proses pemulihan hubungan diplomatik. Awal normalisasi dapat dilihat saat salah satu atau kedua pihak yang berselisih menyadari dan mengakui adanya kebutuhan untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka. Hal ini diikuti dengan upaya mencari jalan keluar untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Salah satunya dengan menyingkirkan seluruh atau sebagian dari penyebab utama dari perselisihan yang telah lama menghalangi sebuah hubungan³⁰

Dalam beberapa kasus pemutusan hubungan diplomatik juga berarti pemutusan terhadap suatu yang berkaitan dengan negara yang diputus, dalam hal ini bisa dengan pemutusan ekonomi, politik, bahkan hingga pelarangan melalui

²⁹ R.P. Barston, (2019) *Modern Diplomacy*. London: Routledge: Hal 242

³⁰ Ibid. Hal. 246.

transportasi. Upaya mengurangi ketegangan, normalisasi sangat diperlukan. Pengurangan ketegangan memiliki beberapa faktor: efek domestik dan eksternal akibat ketegangan, ruang lingkup lembaga yang membawahi negara yang bersitegang, dan seberapa jauh hambatan yang dapat dihilangkan atau ditangani. Dalam upaya normalisasi terdapat sepuluh tahap.³¹

- a) Membangun hubungan melalui jalur formal atau informal
- b) Pertukaran tidak resmi, sebagai contoh adalah pengaturan gencatan senjata dan Pertukaran tawanan
- c) Sinyal tingkat rendah, dengan melakukan hubungan secara rahasia dan Pembukaan hubungan diplomatik secara terbatas
- d) Dimulainya kembali hubungan perdagangan dan hubungan keuangan secara Parsial
- e) Dimulainya kembali negosiasi, baik melalui pihak ketiga atau secara langsung
- f) Membuat kesepakatan dan membangun kembali hubungan diplomatik
- g) Implementasi normalisasi

Bentuk ketergantungan yang menjadi salah satu alasan kembalinya hubungan suatu negara berkaitan erat dengan faktor ekonomi. Dalam upaya normalisasi, inisiatif ekonomi sering berupaya memisahkan hubungan perdagangan dan keuangan dari perselisihan politik

Kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik biasanya mengambil berbagai bentuk yang berbeda di setiap kasusnya. Ini termasuk diskusi informal yang dilengkapi dengan pernyataan sepihak mengenai hubungan antara kedua negara, pernyataan bersama, pengaturan normalisasi sepihak, sampai kesepakatan normalisasi formal. Ada pula normalisasi berdasarkan pertukaran diplomatik informal dan pernyataan sepihak misalnya permintaan maaf atau pernyataan kebijakan yang direvisi. Dalam beberapa kasus pembukaan kembali fasilitas konsulat untuk mempromosikan perdagangan dapat dianggap lebih penting daripada menyelesaikan

³¹ R.P. Barston, (2019).Hal: 280

sengketa politik yang sudah berlangsung lama.³²

Pada tingkat ekonomi, hubungan perdagangan dan keuangan sering kali memisahkan diri dari aspek politik. Namun, terdapat kemungkinan bila kerja sama perdagangan berlaku dalam kondisi hubungan diplomatik yang terputus maka hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tekanan domestik. Tekanan ini akan menuntut agar diberlakukannya normalisasi hubungan diplomatik serta penghapusan batasan-batasan dan larangan dalam sektor perdagangan. Maka melakukan normalisasi hubungan diplomatik sebelum melanjutkan ke tahap kerja sama perdagangan dapat mencegah adanya tekanan masyarakat secara domestik

Selama proses normalisasi hubungan diplomatik, negara-negara yang hubungannya tidak berjalan baik maupun terputus, mula-mula dilakukan sejumlah pertemuan informal, terkadang bersifat rahasia, bertujuan membicarakan bagaimana upaya menyelesaikan masalah demi tercapainya normalisasi. Pertemuan secara formal dilakukan untuk membahas lebih jauh mengenai proses normalisasi. Puncaknya, setiap negara menyepakati sejumlah kesepakatan yang telah dibahas, sehingga normalisasi bisa dicapai. Setelahnya, dilakukan pembangunan kondisi agar hubungan menjadi resmi, dan sejumlah kebijakan yang disepakati mulai diimplementasikan keberlanjutannya pada sektor-sektor yang dibutuhkan.

Normalisasi dianggap sebagai upaya yang dilakukan karena adanya kepentingan mendesak dari setiap aktor negara bersangkutan. Ketika salah satu atau semua negara menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan mereka, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi ketegangan yang ada, dengan cara mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketegangan tersebut. Masalah yang diselesaikan kemudian berdampak pada keberlanjutan hubungan diplomatik ke arah yang lebih baik. Dalam menyelesaikan permasalahan, Barston mengemukakan tahapan-tahapan yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Barston mengemukakannya menjadi

³² Ibid.Hal:283

10 tahapan normalisasi, antara lain;

- a) mulai membangun hubungan, baik melalui jalur formal maupun informal
- b) adanya bentuk pertukaran informal, seperti gencatan senjata dan/atau pertukaran tawanan
- c) melakukan hubungan informal secara tersembunyi dan dibangunnya hubungan diplomatik secara terbatas, hal ini disebut *low level signaling*.
- d) dibukanya kembali hubungan perdagangan maupun bank secara terbatas.
- e) jalur negosiasi yang dibuka melalui mediasi dari pihak ketiga, baik secara langsung maupun rahasia.
- f) dihapuskannya hambatan perdagangan dan embargo.
- g) *revisions of policy*, yaitu revisi dari kebijakan yang terkait dengan proses dari normalisasi.
- h) negosiasi dalam isu-isu utama dari normalisasi.
- i) dibuatnya kesepakatan dalam normalisasi dan pembangunan kembali dari hubungan diplomatik.
- j) implementasi dari normalisasi.

Normalisasi dipandang perlu dalam melihat fenomena internasional dalam upaya pengembalian hubungan diplomatik antar negara yang sebelumnya putus. Dengan sepuluh tahapan yang dijabarkan oleh Barston dapat melihat proses serta upaya negara dalam mengembalikan hubungan yang terputus karena suatu alasan. Oleh karenanya konsep ini dipandang perlu dalam menjabarkan skripsi ini.

2.2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional oleh Charles A. Beard, adalah sebuah penyelidikan historiografi ke dalam penggunaan istilah di Amerika modern Sejarah negara dan kebijakan luar negeri hingga periode Baru Roosevelt Deal di tahun 1930-an Dalam penyelidikannya, Beard melacak klaim paling awal yang dibuat atas nama kepentingan nasional kembali ke Italia abad keenam belas dan Inggris abad ketujuh belas ketika ‘alasan’ negara ‘(raison d’état), ‘kepentingan dinasti’ dan ‘kehendak

penguasa' mulai kehilangan keampuhannya dan digantikan dengan istilah yang lebih akurat mencerminkan perubahan yang terjadi dalam bentuk kontemporer dari diplomasi politik.

Studi Beard penting karena menjelaskan bagaimana 'kepentingan nasional sebagai ide dan kebangkitan negara-bangsa sebagai bentuk politik modern asosiasi yang coterminous. Pemeriksaan mendetail Beard tentang Kepentingan Nasional dalam Teori Hubungan Internasional catatan diplomatik mengungkapkan bahwa istilah kontroversial dan dengan ramalan yang luar biasa untuk masa depan arah penelitian dalam Hubungan Internasional, Beard meneliti peran yang dimainkan oleh argumen kepentingan nasional dalam membela komersial AS dan perluasan wilayah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mengantisipasi diskusi yang akan terjadi kemudian antara konservatif dan radikal, realis dan Marxis, catatan Beard menekankan sejauh mana kepentingan ekonomi kelompok tertentu di AS masyarakat telah, dari waktu ke waktu, telah disajikan sebagai kepentingan nasional Amerika Serikat. Ini adalah klaim yang sangat penting dan salah satunya didukung dengan dokumentasi yang luas dan studi kasus yang relevan.³³

Dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi, Qatar menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya, terutama kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi. Pemutusan hubungan diplomatik dan blokade oleh Arab Saudi dan koalisinya menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perekonomian Qatar. Oleh karena itu, Qatar berusaha melindungi kepentingan ekonominya melalui normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, ekspansi Pelabuhan Hamad, serta melakukan *nation branding* dalam bidang ekonomi. Kemudian, Qatar melindungi kepentingannya melalui penguatan kerja sama militer dengan Turki dan mempertahankan keberadaan pangkalan militer Al-Udeid milik Amerika Serikat. Selain itu, penolakan Qatar terhadap tuntutan Arab Saudi sejalan dengan kepentingan nasionalnya untuk menyaingi pengaruh Arab Saudi

³³ Scott Burchill. (2005) *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan

di kawasan Teluk.

Kepentingan nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'État* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Argumentasi Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki, kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang.³⁴

Pada kenyataannya, ada banyak cara pandang tentang “kepentingan nasional” yang saling berkaitan satu sama lain dalam teorisasi HI. Dalam buku ini, Burchill melakukan analisis tentang konsep “kepentingan nasional” dalam lima perspektif: realisme, marxisme, liberalisme, konstruktivisme, dan *English school*. Kelima perspektif ini memberikan cara pandang yang sangat berbeda, dan punya implikasi praktis yang juga berbeda, dalam memahami “kepentingan nasional”.

Realisme adalah perspektif yang mula-mula mencoba untuk melakukan konseptualisasi utuh mengenai “kepentingan nasional”. Sesuai dengan namanya, “realisme” bertujuan untuk menjelaskan HI “apa adanya” (*as it is*) dengan pandangan dunia Hobbesian yang “anarkis”, *self-governed*, selalu dihantui oleh kecurigaan, rasa *was-was* diserang, dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik

³⁴ Bainus, Arry. & Rachman, Budi J. (2018). *Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*. Intermestic: Journal of International Studies. Vol. 2, No. 2 diakses pada 14 Februari 2023

internasional. Pandangan ini melihat bahwa “kepentingan nasional” harus dilihat dari kepentingan negara karena sejak 1648, “negara” adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan “anarkisme” dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara. Oleh karena negara adalah satu-satunya aktor, keputusan luar negeri hanya mengakui “negara” sebagai satu-satunya entitas. Oleh sebab itu, “kepentingan nasional” tak lain adalah “kepentingan negara” yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki.

Pandangan semacam ini, sebagaimana dikutip oleh Burchill, direpresentasikan dengan sangat baik oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya, perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang³⁵

Cara pandang ini pernah dikemukakan oleh Vedi R Hadiz. Ada tiga hal penting dalam cara pandang “ekonomi politik” ini. Pertama, tidak ada orang yang bisa memonopoli definisi tentang “kepentingan nasional” secara kaku dan final, karena ia harus menghadapi fakta bahwa ada interpretasi berbeda tentang kepentingan nasional tersebut. Hal ini berarti definisi tentang “kepentingan nasional” selalu berada dalam ruang perlombaan yang dinamis. Kedua, pengambilan kebijakan publik akan cenderung mewakili kepentingan kelompok dominan, baik di level politik, teknokratik, maupun struktur kelembagaan lain, sebab ada *vested interest* yang ditanamkan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Ketiga, definisi tentang “kepentingan nasional” mesti dipertarungkan melalui perdebatan-perdebatan dan mekanisme politik yang demokratis, bukan model pengambilan “teknokratis” apalagi didefinisikan sendiri oleh presiden atau partai berkuasa.³⁶

Realisme secara luas dianggap sebagai tradisi teoretis yang paling

³⁵ Scott Burchill.(2005). *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan

³⁶ Scott Burchill.(2005). *The National Interest in International Relations Theory*.Palgrave Macmillan

berpengaruh dalam Hubungan Internasional, bahkan oleh para pengkritiknya yang paling keras. Ini kuno warisan filosofis, kritiknya yang kuat dan orisinal terhadap internasionalisme liberal, bersama dengan pengaruhnya terhadap praktik internasional diplomasi telah mengamankannya sebagai posisi penting, jika tidak lagi dominan dalam disiplin. Tidak ada teori lain yang memberikan bentuk dan struktur sebanyak ini untuk studi politik internasional, khususnya untuk sub-bidang Kajian Keamanan dan Ekonomi Politik Internasional. Seperti namanya, realisme berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan dunia politik internasional sebagaimana adanya, daripada bagaimana kita menginginkannya. Dengan demikian, dunia diungkapkan kepada realis sebagai dunia yang berbahaya dan tempat yang tidak aman, di mana kekerasan disesalkan tetapi endemik. Dalam mereka penjelasan tentang sifat konfliktual politik internasional, realis memberikan prioritas tinggi untuk negara-bangsa dalam pertimbangan mereka, mengakui sebagai otoritas politik tertinggi di dunia.³⁷

Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerja sama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.³⁸

Daniel S. Papp juga menjelaskan tentang produk dari kepentingan nasional yaitu Power. Power atau kekuatan disini menerangkan tentang metode dan aksi yang menggunakan percobaan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Daniel juga menjelaskan bahwa Power merupakan produk dari beberapa pemasukan potensi kekuatan dari beberapa aktor negara atau bahkan negaranya sendiri. Potensi tersebut

³⁷ Ibid.

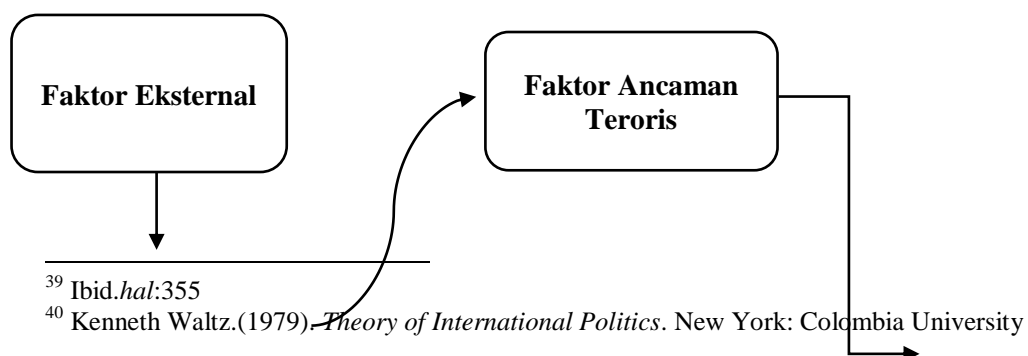
³⁸ Daniel S. Papp.(1988). *Contemporary International Relations*. London: Macmillan Publishing Company .

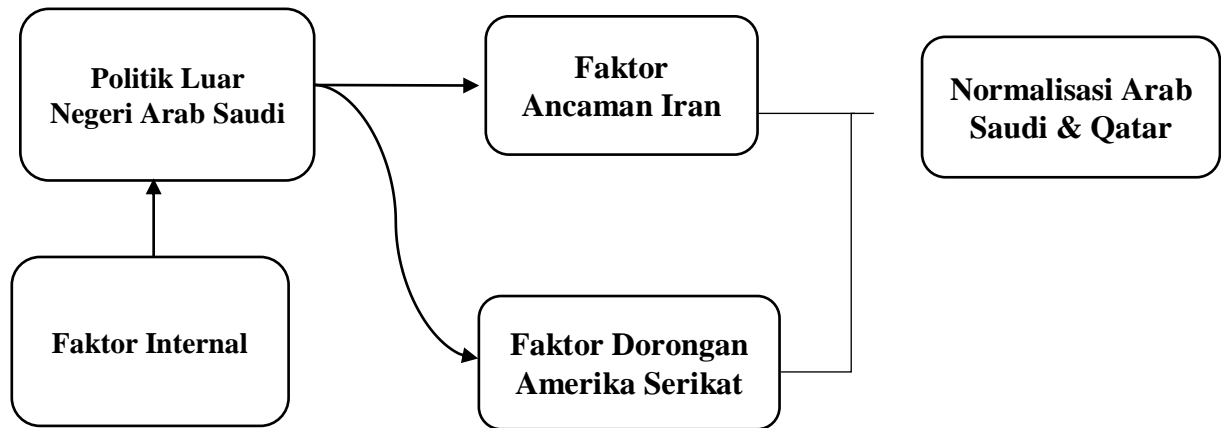
merupakan populasi negara; segi geografis; sumber daya alam, kapabilitas industri; dan kapabilitas militer. Tersedia lima kriteria Power menurut Daniel yaitu: kriteria ekonomi; kriteria ideologi; keamanan militer; moralitas dan legalitas. Potensi kekuatan dari kriteria ekonomi bisa dilihat pada suatu negara dengan posisi ekonomi suatu negaranya tersebut.³⁹

Dalam kepentingan nasional yang dikemukakan oleh *Morton A. Kaplan* menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan sistem untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Adanya perilaku suatu negara untuk melakukan perimbangan kekuatan dalam hubungan internasional. Kekuatan ini disebut dengan *Balance of Power* atau BOP. BOP merupakan penyusunan hubungan internasional yang bertujuan untuk membuat tidak ada negara yang kedudukannya berada di posisi lebih kuat dibanding dengan negara lain dan melakukan intervensi. Dalam hubungan internasional, perimbangan kekuatan juga harus dilakukan oleh suatu negara. Kekuatan yang dimaksud ialah *Balance of Power (BoP)*⁴⁰

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pola dari pemikiran peneliti. Kerangka berpikir ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang sudah disusun secara sistematis dan menggabungkannya dengan kasus atau fenomena yang ingin diteliti. Dengan menentukan hubungan antar variabel dan memberikan argumen teoritis terkait fenomena tersebut.





Sumber: Diolah oleh Peneliti

Politik Luar Negeri Arab Saudi memiliki perubahan dan juga terdapat faktor internal dan external dalam perubahan kebijakan Luar Negeri negara tersebut. Berkurangnya Ancaman Terorisme, Berkurangnya kedekatan Qatar dengan Iran, Dan Faktor dorongan Amerika Serikat yang menjadikan Normalisasi antara Arab Saudi dengan Qatar terjadi.